

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PASCA ADANYA WISATA
HUTAN MANGROVE DI DESA NIPAH PANJANG KECAMATAN
BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

LIDYA YANTI SUGARTI^{1*}
E1021161094

Hasan Almutahar², Donatianus

*Email: lidyayanti111@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

LIDYA YANTI SUGARTI: Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Adanya Wisata Hutan Mangrove Di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Skripsi Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Melalui Program yang di Berikan Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat (LSM) Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Nipah Panjang, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini di lakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan 7 orang informan. Data yang di kumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penulisan ini menunjukan bahwa program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan wisata hutan mangrove di wilayah pesisir Desa Nipah Panjang, melalui LSM SAMPAN dan LPHD berdampingan dalam mengelola wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang, LSM SAMPAN melaksanakan program yang memanfaatkan hutan mangrove untuk penghasilan tambahan di Desa Nipah Panjang dengan adanya LSM SAMPAN kesadaran masyarakat dalam meningkatkan sosial ekonomi pendapatan masyarakat bertambah.

Kata Kunci: Kondisi Sosial Ekonomi, Mata Pencaharian, Wisata Hutan Mangrove, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Lidya Yanti Sugarti, Nim: E1021161094
Program Studi Pembangunan Sosial FISIP UNTAN

**THE SOCIAL-ECONOMY OF THE COMMUNITY AFTER THE MANGROVE
FOREST EXCURSION IN NIPAH PANJANG VILLAGE BATU AMPAR
SUBDISTRICT KUBU RAYA REGENCY**

BY:

LIDYA YANTI SUGARTI^{1*}

E1021161094

Hasan Almutahar², Donatianus

*Email: lidyayanti11@student.untan.ac.id

1. Student of Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Lecturer of of Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

LIDYA YANTI SUGARTI: The Social-Economy Of The Community After The Mangrove Forest Excursion In Nipah Panjang Village Batu Ampar Subdistrict Kubu Raya Regency. Thesis of Social Development Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Tanjungpura, Pontianak 2021.

This study aimed to describe the social-economy condition of the community through the Non-Governmental Organization (NGO) *Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN)* program which increases the local community's awareness in maintaining the mangrove forest excursion in the coastal area of Nipah Panjang Village, Batu Ampar Subdistrict, Kubu Raya Regency. This research used the qualitative descriptive method with 7 research subjects. The techniques of data collections were in-depth interview, observation, and documentation. The techniques of data analysis were data reduction, presentation, and conclusion. The results showed that the NGO *SAMPAN* along with the Village Forest Management Organization maintained the mangrove forest excursion in Nipah Panjang Village. The NGO *SAMPAN* conducted a program which making the best use of the mangrove forest for the additional income in Nipah Panjang Village since the local community's awareness to increase their social-economy income had improved.

Kata Kunci: Social-Economy Condition, Livelihood, Mangrove Forest Excursion, Non-Governmental Organization.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Hutan merupakan kekayaan alam yang memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan alam. Kekayaan alam yang tersimpan dalam sumber daya berupa hasil hutan yang di jadikan sumber bahan pangan, sumber bahan bangunan, sumber bahan kerajinan, dan sumber obat-obatan. Hutan dalam kajian sosilogis beretalian erat dengan masyarakat yang tinggal ratusan tahun didalam dan sekitarnya. Relasi tersebut karena ketergantungan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup secara turun temurun berasal dari sumber daya hutan. Pada skala lebih besar hutan juga memiliki fungsi untuk pengatur tata air, pengatur iklim global,

Lidya Yanti Sugarti, Nim: E1021161094
Program Studi Pembangunan Sosial FISIP UNTAN

dan merupakan habitat bagi flora-fauna untuk berkembang biak, penyerbukan, serta sebagai penyeimbang ekosistem lainnya. Serta tersedia bahan baku untuk industry baik yang berada di atas maupun di dalam kawasannya.

Sayangnya pada masa lalu kebijakan kehutanan hanya mengotimalkan produk kayu dengan bertumpu pada perusahaan swasta/negara, dan pemberian izin dalam skala yang besar. Hal tersebut tidak terlepas pada masa lalu berpatok pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, serta PP No. 22 Tahun 1967 Tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. Dampak dari orientasi tersebut berupa ketidakadilan sosial karena pengelolaan hutan

bertumpu pada investasi skala besar dengan menyerahkan pengelolaan hutan kepada investasi asing maupun dalam negeri dengan mengabaikan masyarakat desa/adat yang sudah ratusan tahun turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan, sehingga menimbulkan konflik dimana-mana maupun kemiskinan masyarakat desa/adat sekitar hutan. Menurunnya keseimbangan lingkungan ditandai dengan bencana longsor, banjir, kebakaran hutan dan berkontribusi pada percepatan laju perubahan iklim dengan pelepasan emisi CO₂ dari eksploitasi hutan.

Orientasi pengelolaan kehutanan yang demikian kemudian menimbulkan kritik dari banyak pihak, tidak hanya di nasional tetapi dalam skala internasional. Jawaban atas kritikan tersebut kemudian muncul gagasan tentang perhutanan

sosial, gagasan yang menjadikan masyarakat desa/adat sebagai actor utama dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 1997 lahir kebijakan tentang hutan kemasyarakatan. Gagasan tentang perhutanan sosial kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sistem perhutanan Sosial semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jowo Widodo dengan memasukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019) dengan target 12,7 Juta Hektar. Obyek untuk implementasi perhutanan sosial juga diperjelaskan dengan diterbitkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS). Pelaksana untuk implementasi di perluas dengan melibatkan msyarakat sipil dengan di bentuk Kelompok Kerja Perhutanan

Sosial (POKJA PS) di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Perhutanan Sosial Sesuai dengan PERMENLHK No.83 tahun 2016 terdiri dari 5 skema yakni Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Kemiteraan.

Perhutanan sosial merupakan solusi yang tepat, karena memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara mandiri. Prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan yang telah di terapkan dari berbagai generasi akan terus berjalan dengan sistem ini. Secara sederhana, konsep ini dapat di gambarkan sebagai pencapaian keseimbangan-keseimbangan antara tuntutan masyarakat yang semakin meningkat untuk produk hutan, maaf dan pelestarian kesehatan hutan dan

keanekaragaman. Keberlanjutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup hutan, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Menjawab soal implementasi tentang perhutanan sosial, Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan sejak tahun 2012 memfasilitasi masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar untuk mengajukan Hutan Desa. Paling tidak ada 4 tahap yang di lakukan yakni tahap persiapan (tahun 2012-2013) dengan melakukan identifikasi kawasan hutan dan potensinya, pemetaan wilayah dan wasasan yang akan di ajukan untuk hutan desa, pembangunan kesepakatan desa ditingkat desa dan Pembangunan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Tahap kedua pengajuan Hutan Desa (tahun 2013-2014) dengan

melakukan penyusunan proposal, penyusunan peraturan desa, permohonan rekomendasi ke Bupati, dan pengajuan ke Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK). Tahap ketiga perbaikan berkas dan peningkatan SDM LPHD (tahun 2014-2016) kegiatannya dengan fasilitasi verifikasi dari tim KLHK, tapas, batas desa, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta pembentukan kelompok-kelompok pengelola. Tahap keempat pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Oleh KLHK untuk 10 desa tahun 2017.

Keluarnya HPHD untuk 11 Desa Bentang Pesisir Padang Tikar, secara otomatis masyarakat desa melalui LPHD memiliki dasar legal untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan

kayu serta pemanfaatankawasan hutan. Oleh karenanya, untuk memastikan prinsip pengelolaan hutan yang adil, lestari untuk kesejahteraan masyarakat kemudian disusun Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Desa (RPKHD). Rencana Pengelolaan Hutan Desadalam dokumen ini meliputi dari RPKHD Bentang Pesisir Padang Tikar yakni rencana yang di buat (mencakup) satu bentang alam untuk memadu kerja 10 tahun, RPHD merupakan rencana yang dibuat oleh masing-masing desa untuk memadu kerja selama 1 tahun.

Desa Nipah Panjang sudah banyak melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan LSM SAMPAN kegiatan yang di laksanakan di sana biasanya pengelolaan madu kelulut, pengelolaan tempurung kelapa, pengembangan hutan desa serta

pengelolaan salai pisang. Sebelum adanya program LSM SAMPAN masyarakat Desa Nipah Panjang sudah dari dulu bekerja sebagai petani pekebun dan memanfaatkan hutan desa. LSM SAMPAN berperan sebagai pihak yang menghubungkan dari Desa ke pihak yang berwajib dengan adanya LSM SAMPAN bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Keadaan masyarakat bentang pesisir padang tikar kependudukan data BPS Batu Ampar dalam angka 2017 masyarakat mendiami 11 desa adapun desa tersebut Padang Tikar Satu, Medan Mas, Tasik Malaya, Sungai Besar, Sungai Jawi, Ambarawa, Nipah Panjang, Batu Ampar, Tanjung Harapan, Teluk Nibung, Padang Tikar Dua dan berjumlah 31.075 jiwa (laki-laki 15.799 jiwa perempuan 15.276 jiwa)

atau 7.160 rumah tangga. Berdasarkan

hasil study yang di lakukan, masyarakat yang tinggal di BPPT rata-rata memiliki ketetarikan pertalian persaudaraan. Penduduk asli bentang pesisir padang tikar suku melayu, namun dalam perkembangannya saat ini mayoritasnya merupakan masyarakat pendatang dari suku bugis jawa, Madura, tionghoa, dan berbaur suku-suku lain.

Keadaan sosial dan budaya masyarakat di HD BPPT sebagian besar berasal dari suku Melayu, suku Bugis, suku China, dan suku Madura, serta Jawa. Selain itu, ada juga pendatang yang berasal dari luar BPPT yang datang merantau atau mendatangi sanak saudara, kemudian tinggal dan menetap dan akhirnya berlekeluarga di BPPT. Penduduk Bentang Pesisir Padang Tikar mayoritas beragama islam. Karenanya kebudayaannya sempat di pengaruhi

oleh kebudayaan islam, kebudayaan dalam penghormatan alam juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, dalam bentuk rasa syukur terhadap Allah yang di berikan melalui kekayaan alam yang melimpah. Kebudayaan tersebut seperti Robo-Robo yang di lakukan setiap bulan safar (tahun hijrah) setiap hari rabu terakhir, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa bersyukur. Kemudian kebudayaan memberi makan di laut di lakukan setiap menjelang musim barat, dan kasih member makanan darat disaat pada musim tanam padi. Kegiatan kebudayaan tersebut merupakan permohonan agar tidak terjadi bencana atau gagal panen.

Mata pencarian dan pangan masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar mayoritas

mengantungkan hidupnya dari alam yakni dari sektor perikanan sebagai nelayan dan sektor pertanian sebagai perkebunan kelapa maupun beladang. Perairan laut, sungai, maupun hutan mangrove merupakan wilayah bersama bagi nelayan untuk mencari nafkah. Rata-rata petani memiliki kebun kelapa luas lahan 0,5 sampai dengan 5 ha perkepala keluarga. Serta khusus di desa Nipah Panjang, Desa Batu Ampar, dan Teluk Nibung sebagian sela-sela tanaman kelapa, ditanamai kopi, pisang, selain itu terdapat tanaman pinang, nangka, petai, jengkol, dan lainnya.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan petani dan nelayan merupakan mata pencarian utama masyarakat.

Selain itu terdapat pedagang, tukang kayu/batu, buruh pemanjat atau pengupas kelapa. Serta guru, tenaga

kesehatan, aparat PORLI/TNI, dan Aparat Sipil Negara, serta perangkat Desa. Pengangguran terbuka relative tidak ada, karena mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kegiatan ekonominya dengan berkerja serabutan baik menjadi buruh maupun pergi melaut. Sebelum adanya wisata hutan mangrove nelayan sudah lama bekerja sebagai nelayan. Perkiraan produksi atau pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan perharinya dengan jumlah dan jenis sebagai berikut: Ikan Gabus kurang lebih 5-7 kg, ikan Toman kurang lebih 4kg, ikan Sepat kurang lebih 5kg, ikan Betok 5kg, ikan Biawan 2kg, udang galah kurang lebih 10kg, kepiting bakau 50kg. Hasil nelayan tersebut dimanfaatkan untuk konsumsi dan dijual. Perkiraan produksi atau pendapatan perkebunan lokal

masyarakat dengan jumlah dan jenis

sebagai berikut: kelapa 3.639.440 butir/3bulan/pohon hasil kopra dijual kering dan tempurung dijadikan arang tempurung kering, kopi gambut 83kg/bulan/ha hasil dikonsumsi pribadi, petai 20/bulan hasil dikonsumsi dan dijual, pisang 4bonngol/pohon/musim hasil dikonsumsi dan dijual, mangga 50kg/pohon/musim hasil dikonsumsi dan dijual, kopi 5kg/pohon/musim hasil dikonsumsi dan dijual, pinang 20kg/pohon/musim hasil dijual, rambutan 60kg/pohon/musim hasil dijual. .

Kebutuhan karbohidrat masyarakat berasal dari pertanian padi hasil sawah/lading dengan pola tanaman 1 tahun sekali. Hasil pertanian tersebut sebagian besar disimpan oleh masing-masing petani untuk mencukupi kebutuhan atau satu tahun kedepan.

Serta sebagian kecil dijual kepada masyarakat yang tidak bertani. Berdasarkan hasil produksi padi di bentang pesisir padang tikar hasil panen mampu mencukupi 9 bulan. Sisa dari kekurangan tersebut petani membeli baik ke pasar maupun bantuan pemerintah melalui RASKIN. Khususnya masyarakat Nipah Panjang terdapat aktivitas ekonomi masyarakat sebagai pekebun kelapa dan budidaya lebah kelulut serta sebagai nelayan.

Adapun Keadaan pendidikan di bentang pesisir padang tikar kecamatan batu ampar saat ini di rasakan sudah cukup baik, hal ini dapat di lihat bahwa di bentang pesisir padang tikar sudah memiliki sarana prasarana pendidikan mulai dari tk/paud, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). Sekolah menengah atas (SMA)/Sekolah

menengah kejuruan (SMK). Fasilitas yang tersedia di masing-masing sekolah dirasakan sudah cukup memadai. Hal ini dapat di lihat dari infrastruktur yang suda dibangun, selain itu tenaga pengajar masing-masing tingkat sekolah juga sudah tersedia. Masyarakat yang ingin melanjutkan pendididkan di tingkat perguruan tinggi harus merantau keluar kota, baik kepontianak maupun di luar Pontianak. Adapun keadaan pendidikan di desa nipah panjang hanya terdapat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang di atur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pem berian posisi itu di

sertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status (Sumardi, 2001:21).

a. Mata Pencarian

pencarian berarti, pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan (sumbu atau pokok), pekerjaan/pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari, misalnya: pencarian penduduk di desa itu bertani. “dengan kata lain sistem mata pencarian adalah cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha pemenuhan kehidupan, dan menjadi pokok kehidupannya baginya”. Pada masa kehidupan manusia prasejarah yang mempunyai pola pemikiran sangat sederhana dimana kegiatannya sebatas berburu

dan meramu makanan, dalam berburu dan meramu inipun ada faktor yang sangat mempengaruhinya yaitu: faktor iklim, kesuburan tanah, keadaan binatang buruan dan lain sebagainya sebagai pendukung kegiatan mereka.

b. Wisata Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan dengan laut.

c. Teori Sosial Ekonomi

Santrock (2007:282), status sosial ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan dan pendidikan ekonomi. status sosial ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan tertentu. Secara umum anggota masyarakat memiliki (1) pekerjaan yang bervariasi prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain; (2) tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik di banding orang lain; (3) sumber daya ekonomi yang berbeda; (4) tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan

berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian status sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kondisi suatu keluarga atau orang tua yang diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis pekerjaan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut moleong (2011:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

phenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dengan tujuan mendapatkan gambaran dan pemahaman secara mendetail.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu berada di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Waktu yang di gunakan dalam melakukan penelitian tentang Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Adanya Wisata Hutan Mangrove Di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya September 2020 hingga Febuari 2021.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian adalah Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Adanya Wisata Hutan Mangrove Di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Yaitu Masyarakat di sekitar Desa Nipah Panjang kurang mengetahui cara pengelolaan wisata hutan mangrove, Setelah adanya wisata hutan mangrove tidak memberikan tambahan penghasilan bagi sebagian masyarakat sekitar wisata hutan mangrove, Sering terjadinya kendala di pesisir seperti tanah longsor pada musim pasang surut.

D. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Sub judul ini menyajikan temuan data lapangan dalam bentuk

deskripsi mengenai Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Adanya Wisata Hutan Mangrove Di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. maka di harapkan penulis ini akan memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang bagaimana Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Adanya Wisata Hutan Mangrove Di Desa Nipah Panjang Kubu Raya.

AM menjabat sebagai Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di LSM SAMPAN.

“Alasan kenapa LSM SAMPAN memilih Desa Nipah Panjang sebagai tempat wisata hutan mangrove, karena secara geografis hutannya relative strategis

jadi sangat memungkinkan sekali untuk pintu masuk ke desa Nipah Panjang sehingga bisa mempromosikan desa-desa di sekitarnya. Alasan yang kedua di lihat dari keadaan hutan mangrove itu sendiri relative lebih dikatakan sempurna sehingga keadaan ini sangat baik untuk di promosikan sehingga menimbulkan daya tarik untuk pengunjung. Terus disisi lain keanekaragaman hayatinya secara keseluruhan juga sangat bagus, tetapi di desa ini masih sangat cukup lambat untuk jenis-jenis hutannya. Untuk secara umum keanekaragaman hayatinya lumayan sudah lengkap juga itulah alasan kenapa kami memilih desa Nipah Panjang yang ditetapkan”.
(Wawancara dengan A M 1 Febuari 2021).

Desa Nipah Panjang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah serta keanekaragaman hayati yang bagus.

Letak geografis hutannya relative strategis di Desa Nipah Panjang sehingga sangat memungkinkan adanya wisata hutan mangrove di desa tersebut. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) hadir dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian alam.

“Awal mula sebelum adanya wisata hutan mangrove tersebut kami melakukan identifikasi dulu dengan melihat adanya potensi di Desa Nipah Panjang tersebut maka kami menyusun rencana kegiatan

wisata hutan mangrove termasuk kapasitas masyarakat tentang pengelolaan ekowisata hutan mangrove dan sebagainya”.

(Wawancara dengan A M 1 Febuari 2021).

Berdasarkan penjelasan informan bahwa sebelum adanya wisata hutan mangrove tersebut LSM SAMPAN melakukan identifikasi dengan melihatn adanya potensi di Desa Nipah Panjang sehingga dari LSM SAMPAN menyusun rencana kegiatan wisata hutan mangrove termasuk kapasitas masyarakat tentang pengelolaan ekowisata hutan mangrove.

“pengaruh wisata hutan mangrove bagi masyarakat di Desa Nipah Panjang yang pertama yaitu potensi kelompok masyarakat atau

kelompok ekowisata itu masyarakat banyak berlatih tentang pengelolaan wisata hutan mangrove, komoniti untuk mendukung pengembangan ekowisata tersebut selain itu adanya jalinan dengan masyarakat atau kelompok wisata hutan mangrove sehingga makin lebih baik antara sosial ekonomin aspek ekonominya dengan cara bagaimana masyarakat memberlakukan orang-orang yang berkunjung ke Desa tersebut sehingga berdampak juga untuk aspek ekonominya".(Wawancara A, 12 Januari 2021).

Pengaruh wisata hutan mangrove bagi masyarakat di Desa Nipah Panjang yaitu potensi kelompok masyarakat atau kelompok ekowisata itu masyarakat banyak berlatih tentang pengelolaan wisata

hutan mangrove, komoniti untuk mendukung pengembanagn ekowisata tersebut selain itu adanya jalinan dengan masyarakat atau kelompok wisata hutan mangrove sehingga makin lebih baik antara sosial ekonominya dengan cara bagaimana masyarakat di Desa Nipah Panjang memberlakukan orang-orang yang berkunjung ke Desa tersebut sehingga hal ini juga akan berdampak bagi aspek ekonomi.

"Kondisi sosial ekonomi di Desa Nipah Panjang untuk saat ini Sangat kecil sekali untuk wisata hutan mangrove. Belum menjadi potensi unggulan di wisata hutan mangrove, untuk pengembangan wisata masih sangat minim karena akses masih sangat jauh dan

membutuhkan biaya yang mahal untuk ke Desa Nipah Panjang serta untuk fasilitas masih sangat minim, kurang efisien dalam pengelolaan wisata hutan mangrove kadang-kadang aktif dan kadang-kadang tidak karena belum menjadi pendapatan utama masyarakat sekitar wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang. Kecuali untuk kedepannya untuk para tim pengelola hutan mangrove mengelola wisata tersebut sudah bisa menghasilkan setiap bulan kedepannya pasti wisata tersebut bisa berkembang, untuk saat ini Tim LSM SAMPAN masih berupaya dalam proses pengembangan melalui tim, pengembangan kelompok, kebijakan dari kepala Desa untuk menjamin sistem kedepannya sehingga nilai jual mampu menarik

pengunjung. Kemudian di sisi lain untuk akses tersebut itu yang menjadi pertimbangan buat pengunjung tapi di sini, ada poin pentingnya dimana pengembangan wisata hutan mangrove tersebut masih di jalankan dari kebijakan Desa. Selain itu nilai peningkatan ekonomi di Desa Nipah Panjang untuk sekarang ini belum sampai ditahapan untuk di jual wisata pengembangannya". (Wawancara dengan VE.T, 6 Januari 2021)

Untuk saat ini kondisi sosial ekonomi di Desa Nipah Panjang masih sangat minim untuk potensi wisata di Desa tersebut. dampak yang muncul secara ekonomi belum ada tetapi untuk kesadaran masyarakat untuk peluang tersebut sudah ada dan untuk secara kondisi sosial

kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk pengembangan wisata hutan mangrove tersebut. Dari tim LSM SAMPAN masih berupaya dalam proses pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang dan pengembangan wisata hutan mangrove masih proses di jalankan dari kebijakan Desa.

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi di masyarakat di desa Nipah Panjang pada awalnya Memang berkerja sebagai petani atau pekebun karena menurut mereka wisata hutan mangrove belum membawa dampak serta menguntungkan bagi masyarakat sekitar hutan mangrove, Berdasarkan pendataan yang dilakukan petani dan nelayan merupakan mata pencarian utama

masyarakat. Selain itu terdapat pedagang, tukang kayu/batu, buruh pemanjat atau pengupas kelap. Serta guru, tenaga kesehatan, aparat PORLI/TNI, dan Aparat Sipil Negara, serta perangkat Desa. Pengangguran terbuka relative tidak ada, karena mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kegiatan ekonominya dengan berkerja serabutan baik menjadi buruh maupun pergi melaut. Sebelum adanya wisata hutan mangrove nelayan sudah lama bekerja sebagai nelayan. Adanya wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang saat ini belum menjadi pendapatan utama masyarakat di desa tersebut tetapi masyarakat di Desa Nipah Panjang banyak memanfaatkan dari hasil Hutannya salah satu produk unggulan mereka saat ini yaitu madu

kelulut yang mereka jual selain itu juga ada pengelolaan tempurung kelapa, dan pengelolaan salai pisang. Dari hasil produk tersebut menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat di Desa Nipah Panjang.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Mengelola Wisata Hutan Mangrove

Keterkaitan dengan adanya perkembangan wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang sementara belum ada perkembangan adapun faktor penghambat dari pengembangan wisata hutan mangrove antara lain: Wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang belum menjadi potensi unggulan,

Untuk pengembangan wisata hutan mangrove masih sangat minim karena akses masih sangat jauh dan

biaya yang mahal untuk ke Desa Nipah Panjang serta untuk fasilitasnya sangat minim., Kurang efisien dalam mengelola wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang, Tidak semua masyarakat setuju dalam pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang, Kurangnya dana dalam pengembangan wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang, Susah meyakinkan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove, Kurangnya pendampingan dari pemerintah dalam pengelola wisata di Desa Nipah Panjang.

3. Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Analisis dengan teori yang di gunakan oleh peneliti

yaitu teori perubahan sosial ekonomi. Menurut Soerjono Soekanto (2007:80) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan, pergaulan, prestasi, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Menurut Soekanto (2001:237) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan.

LSM SAMPAN Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) adalah salah satu organisasi yang bertujuan untuk mengelola wisata hutan mangrove di desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi sipembawa status misalnya pendapatan, pekerjaan dan pendidikan (Soekanto, 2003:179).

Dalam ini ada kitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mana proses kondisi sosial ekonomi pasca adanya wisata hutan mangrove yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) diharapkan mampu membuat masyarakat percaya serta kesadaran masyarakat untuk mengelola wisata kedepannya

dengan baik sehingga lebih mampu mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian mereka.

2. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kondisi sosial ekonomi pasca adanya wisata hutan mangrove di desa nipah panjang mayoritas bergantung hidupnya dari alam yakni dari sektor perikanan sebagai nelayan dan sektor pertanian sebagai pekebun maupun beladang. Perairan laut sungai, maupun hutan mangrove merupakan wilayah bersama bagi nelayan untuk mencari nafkah. Oleh karena itu untuk perkembangan ekowisata hutan mangrovenya masih sangat minim karena akses masih sangat jauh membutuhkan biaya yang mahal untuk ke Desa Nipah Panjang sehingga nilai peningkatan

ekonomi di desa tersebut untuk sekarang ini belum maksimal karena tahapan di Desa Nipah Panjang belum sampai tahap untuk di jual wisata pengembangannya. Tetapi untuk saat ini pengembangan wisata hutan mangrove tersebut masih di jalankan dari kebijakan desa.

Adapun kendala yang di hadapai yaitu partisipasi rasa peduli yang rendah dan komunikasi. Selain itu kurangnya efesien dalam pengelolaan wisata hutan mangrove kadang-kadang aktif kadang-kadang tidak karena belum menjadi pendapatan utama masyarakat sekitar wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang.

2. Saran

Selama melakukan penelitian ini sehingga bisa menyele saikan

skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi pasca adanya wisata hutan mangrove di Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

1. LSM SAMPAN agar dapat berkomunikasi secara langsung kepada anggota masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta, memotivasi para anggota masyarakat untuk dapat mengelola wisata hutan mangrove dengan baik.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat agar lebih berperan aktif dalam melaksanakan program-program yang dapat

meningkatkan pengolahan wisata hutan mangrove.

3. Adanya kedadaran serta kepedulian dari masyarakat sekitar dalam mengembangkan wisata di Desa Nipah Panjang sehingga mampu menarik pengunjung.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Bumi Aksara.
- Bengen, D. G. (2002). *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu Berkelanjutan*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut. Insitute Pertanian Bogor. Bogor.
- Bungin, Burhan. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rajawali Pers. Media Group.
- Hastuti, Uniek Yuniar Vili, (2015). *Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Makanan Diobyek Wisata Kabupaten Cilacap* Bachelor Theis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Hutabarat, Rino, 2018. "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kecamatan Pardan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara". Skripsi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan Falkutas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Santrock, J. W. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, soerjono. 2003. *Sosiologi : suatu pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Sumber Data Asli Yang Di Dapatkan Dari Buku "Rencana Kelola Hutan Desa (RPHD)", Bentang Pentang Pesisir Padang Tikar Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Periode 2018-2028 di Sampan Kalimantan.

Sumber Internet:

<https://sampankalimantan.org> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 12:13 WIB.